



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIANA APRIANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 525199

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.420.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	439.500.000
1. MOTOR, VESPA SPRINT VESPA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO E SATIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	407.880.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	431.170.836
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.528.550.836
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.528.550.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.